

BAB IV

SEJARAH DAN KARAKTER KONFLIK PPP

4.1 Berdirinya Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan adalah sebuah partai politik di Indonesia. Pada saat pendeklarasiannya pada tanggal 5 Januari 1973 partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yang memiliki kesamaan dalam penggunaan islam sebagai asas organisasi, serta adanya kesamaan-kesamaan pendapat secara prinsipil, baik menyangkut pelaksanaan aqidah, ibadah serta dakwah islam yang mampu menyatukan langkah-langkah perjuangan Islam.

Selain azas serta keinginan tokoh-tokoh yang mewakili keempat partai Islam, peran pemerintah Order Baru sangat dominan dalam mengabungkan keempat partai islam dalam menghadapi pemilihan umum tahun 1973 sebagai langkah politik pemerintah untuk melakukan penyederhanaan partai politik.

4.1.1 Sejarah Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP yang mampu mempersatukan empat partai umat Islam.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan tempat perjuangan umat Islam dan wahana pembangunan demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan nilai-nilai Islam yang Rahmatan Lil'Aalamiin.¹⁶

Ketua umum DPP PPP yang pertama adalah H. Muhammad Syafaat Mintaredja, SH. yang menjabat sejak tanggal 5 Januari 1973 sampai tahun 1978. Ketua umum yang kedua adalah H. Jailani Naro, SH. yang menjabat dua periode tahun 1978 ketika H. Muhammad Syafaat Mintaredja, SH. mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Muktamar 1 PPP tahun 1984. Dalam muktamar 1, Naro terpilih kembali menjadi ketua umum DPP PPP. Kemudian ketua umum DPP PPP yang ketiga H. Isamil Hasan Matareum, SH. yang menjabat sejak terpilih dalam muktamar 2 PPP tahun 1989 dan kemudian terpilih kembali dalam muktamar 3 tahun 1994.¹⁷

Sebelum era Reformasi PPP dalam perjalanannya telah melakukan muktamar sebanyak 4 kali dan pernah melakukan perubahan lambing partai dari gambar ka'bah (1977-1982) menjadi gambar Bintang (1987-1997) karena mengacu pada UU No. 3/1987, yang mensyaratkan bagi peserta pemilu harus berasaskan Pancasila.

¹⁶ Desi Ratna Sari, Skripsi: “ *Strategi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Meraih Suara Pada Pemilihan Legislatif di Kota Padangsidempuan*” (Padangsidempuan: IAIN, 2018), Hal. 50

¹⁷ Ade Hikmatul Fauziah, Skripsi: “*Sikap Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Suksesi Kepemimpinan Negara Pada Pemilu 2014*” (Jakarta: UIN, 2015), Hal. 44-45.

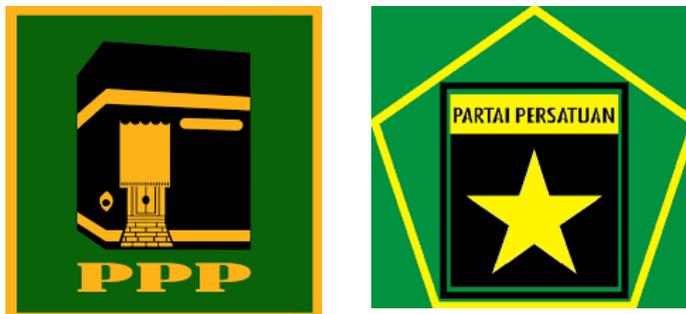
Pada muktamar ke 4 di Jakarta tahun 1998 mengamanatkan PPP kembali ke asas Islam dan kembali menggunakan lambang bergambar ka'bah dan yang terpilih sebagai ketua umum adalah Dr. Hamzah Haz dan H. Alimarwan Hanan, S.H. sebagai Sekretaris Jendral. Ketua umum DPP PPP yang kelima H. Suryadarma Ali yang terpilih dalam Mukttamar 6 tahun 2007 dan H. Irgan Chairul Mahfiz sebagai Sekretaris jendral. H. Suryadarma Ali terpilih kembali pada Mukttamar ke 7 tahun 2011.¹⁸ Ketua umum yang enam Romahurmuziy yang terpilih dalam Mukttamar 8 2016.

Gambar 4.1 Sejarah PPP



¹⁸ *Ibid*

Gambar 4.2
Lambang Partai



4.1.2 Visi dan Misi Persatuan Pembangunan

Visi PPP adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat - martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”.

Di bidang agama, platform PPP menegaskan tentang; 1 perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlakul karimah dengan prinsip amar makruf nahi munkar; 2 pentingnya peran agama Islam sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan; 3 paradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas dan lokalitas keindonesiaan, dan 4 komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama.

Sementara itu di bidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokrasi di Indonesia dan berakhlakul karimah.

PPP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia HAM, menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya good and clean government, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan BUMD, dan mendorong peningkatan keswadayaan nasional (unit usaha keluarga / individual, usaha swasta, badan usaha negara dan koperasi) demi terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.¹⁹

PPP berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi hukum, penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi berkonstitusi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pembaruan hukum nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa aman

¹⁹ (<https://text-id.123dok.com/document/eqo501n5y-visi-dan-misi-ppp.html>), diakses pada tanggal 23 September 2021 pada pukul 01:20)

masyarakat, penguatan institusi dan instrumen penegak hukum, serta penguatan moralitas penegak hukum.

PPP berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan, taat hukum dan tertib sipil, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya rasa aman masyarakat, mencegah segala upaya marginalisasi dan kolonisasi budaya lokal baik atas nama agama maupun modernitas dan pembangunan, mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran etik, moral dan spiritual agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.

PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kualitas kesehatan yang baik. Program pembangunan kesejahteraan hendaknya diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pembangunan kesejahteraan, yang darinya diharapkan lahir manusia Indonesia yang cerdas, trampil, mandiri dan berdaya saing tinggi.

Visi politik luar negeri PPP diorientasikan pada upaya mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut aktif memajukan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan, menolak ketergantungan terhadap pihak luar manapun yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia, memelihara persahabatan antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara lain atas dasar saling menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil, beradab dan dengan prinsip keseimbangan.²⁰

Misi PPP berkhidmat :

1. PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim) dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme / marxisme / leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.
2. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah

²⁰ Alvin Harandi,” Sejarah dan Visi Misi PPP,” (<https://sayaajarkan.com/info-feed/2019/04/09/tahukah-kamu-sejarah-ppp-91013/> , diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 01:30)

(persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.

3. PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal ika.
4. PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat.
5. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridloi oleh Allah SWT, *baladun thayyibatun wa rabbun ghofur*. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang

konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.²¹

4.1.3 Ideologi Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berpendapat bahwa Islam sebagai syari‘at terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta‘ala kepada umat manusia di bumi adalah kebenaran mutlak yang bersifat universal. PPP memandang bahwa, paham keagamaan yang dianut mayoritas umat Islam Indonesia adalah paham keagamaan Ahlul sunnah wal jama‘ah (paham keagamaan yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta salaf as-sholeh). Islam sebagai ideologi dimaksudkan bahwa seluruh pemikiran, sikap, dan kebijakan partai maupun kader-kadernya bersumber dari ajaran Islam, internalisasi nilai-nilai ideologi harus menjadi warna, corak dan Shibghah (identitas) partai yang melambangkan keluhuran dari ajaran Islam.

²¹ Ketetapan Muktamar 8 Pondok Gede Jakarta, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan 2016*.

4.2 PPP Kota Depok

4.2.1 Profil DPC PPP Kota Depok

Struktur organisasi kepemimpinan PPP sesuai dengan pasal 12 AD ART PPP adalah organisasi tingkat nasional dipimpin oleh Dewan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPP PPP, organisasi tingkat provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPW PPP, organisasi tingkat kabupaten atau kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang selanjutnya disingkat dengan DPC PPP, Organisasi tingkat kecamatan dipimpin oleh Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan yang kemudian disingkat dengan PAC PPP dan organisasi tingkat desa atau kelurahan atau sebutan lainnya dipimpin oleh Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan.

Sedangkan DPC PPP Kota Depok berdiri setelah terjadinya pemekaran kota Depok pada Tahun 1999 diresmikan oleh Mendagri.

4.2.2 Prinsip Perjuangan DPC Kota Depok

1. Prinsip Ibadah

Senantiasa berupaya berupaya mendasari perjuangannya dengan prinsip ibadah, dalam arti yang seluas-luasnya yaitu untuk mencapai keridhoan Allah SWT. Oleh karena itu, seluruh kegiatan berpolitik jajaran partai adalah merupakan keterpanggilan untuk beribadah.

2. Prinsip Amar Ma'Ruf Nahi Munkar

Menyeru dan mendorong melaksanakan segala perbuatan yang tercela. Prinsip ini juga melandasi segala landasan perjuangan dalam melaksanakan fungsi untuk menyerap, menampung, menyalurkan, memperjuangkan dan membela aspirasi rakyat dan melaksanakan pengawasan atau kontrol sosial. Dengan prinsip ini partai berusaha mendorong budaya kritis dalam kehidupan masyarakat keseluruhan sehingga tidak terjadi political decay (pembusukan politik) yang mengakibatkan kemungkaran yang lebih jauh oleh sikap tatanan masyarakat secara keseluruhan.

3. Prinsip Kebenaran, Kejujuran dan Keadlian Perjuangan

PPP selalu didasarkan pada penegakan dan pembelaan prinsip kebenaran dalam kehidupan masyarakat. Perjuangan partai mengarah pada perlawanan terhadap kebatilan karena kebenaran yang mutlak hanya Allah SWT yang maha benar. Sementara itu, prinsip kejujuran atau amanah bersifat sentral dan esensial dalam perjuangan PPP. Dengan prinsip kejujuran ini perjuangan dalam bentuk apapun akan menjamin tegaknya saling pengertian, keharmonisan, keserasian, prinsip kejujuran merupakan penunaian amanah dan kepercayaan rakyat yang perlu terus dijaga sehingga terhindar dari perbuatan yang mengkhianati amanah rakyat. PPP terus mempertahankan prinsip keadilan di dalam setiap gerak langkah perjuangannya.

Tegaknya keadilan adalah esensial dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan prinsip keadilan maka segala aturan dapat terlaksana dan berjalan baik sehingga menimbulkan keharmonisan, keselarasan, ketentraman.

4. Prinsip Musyawarah

PPP berpendirian bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Dengan musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai serta menumbuhkan tanggung jawab bersama sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan nyata. Disamping itu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah SWT. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai mufakat maka tidak tertutup kemungkinan pengambilan keputusan ditempuh dengan suara terbanyak mencegah munculnya dictator mayoritas.

5. Prinsip Persamaan, Kebersamaan dan Persatuan

PPP mendasarkan perjuangan atas dasar prinsip persamaan derajat manusia dihadapan Allah SWT. Hal ini adalah keyakinan yang mendasar yang dapat memberikan motivasi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

PPP berjuang untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan dalam memikul beban dan tanggung jawab kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan secara proposional sehingga terhindar dari dominasi, perasaan ditinggalkan dan dikucilkan.

6. Prinsip Istiqomah

PPP menjadikan prinsip istiqomah sebagai prinsip perjuangan. Artinya, PPP sebagai institusi dan kader-kadernya harus gigih, kokoh, teguh pendirian, dan selalu konsisten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan nilai-nilai kebenaran.²²

Disamping itu, prinsip yang mendasar pada PPP adalah nilai-nilai ajaran Islam yang merupakan ideologinya sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan sikap kebijakan yang akan dihadapi dalam memperoleh suatu keputusan. Serta ideologinya merupakan penanaman motivasi dan semangat serta internalisasi nilai-nilai perjuangan dalam pelaksanaan program-program partai disemua aspeknya.

4.2.3 Struktur Kepengurusan DPC PPP Kota Depok

Berdasarkan surat keputusan DPW PPP Jawa Barat maka susunan personalia pengurus harian dewan pimpinan cabang, pimpinan majelis syariah cabang, pimpinan majelis pertimbangan cabang, pimpinan majelis pakar cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok masa bakti 2016-2021.

²²Hasil Ketetapan Muktamar VIII PPP Tentang Anggaran Dasar Pasal 4

Tabel 4.1
Susunan Personalia Pengurus Harian
Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan
Kota Depok Masa Bakti 2017-2022

Ketua	Hj. QONITA LUTFIA, SE, MM
Wakil Ketua Bidang Organisasi, dan Kaderisasi Keanggotaan	MAHZAB HM
Wakil Ketua Bidang Agama (Dakwah, Zakat, dan Infak)	H. ROHIMI AZHARI, SPd.I
Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga & Advokasi Hukum dan Ham	RIHADI BS
Wakil Ketua Bidang Teknologi Informasi dan Hub. Media	IRWAN, AMd.
Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olah Raga	DODY RIYANTO, S.Kom.
Wakil Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan Kewirausahaan	BAMBANG JAYA SUPENA
Wakil Ketua Bidang BAPILU	ABDUL QODIR, S.Ag
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Dapil Sawangan BJ. Sari, dan Cipayung	ANDRE PRAMUDYA, SPd.I
Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Hj. SRI KUSTIANI, SE
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Dapil Cilodong dan Tapos	YAM SYARI AMIRUDIN, ST
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Dapil Cinere, Limo dan Beji	Ir. SALBIAWATI
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Dapil Sukmajaya	WIDIA TUNTA

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Dapil Pancoran Mas	Drs. RAHMATULOH
SEKRETARIS	MA'MUN ABDULLAH, ST
Wakil Sekretaris Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi	MUHAMAD IDRUS, SPd.I
Wakil Sekretaris Bidang Agama (Dakwah, Zakat & Infaq)	H. YUSUF
Wakil Sekretaris Bidang Hubungan Antar Lembaga & Advokasi Hukum dan Ham	SUBARI, SE
Wakil Sekretaris Bidang Teknologi Informasi dan Hub, Media	SRI ENY HARYANI
Wakil Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan Kewirausahaan	WAHYU EFENDI
Wakil Sekretaris Bidang BAPILU	ICWAN SETIAJI
Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	DIDING HARDI MULYA
Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Dapil Sawangan, Bj.Sari & Cipayung	M. AGUS SHOLEH, SSi
Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SITI RAHMAH
Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Dapil Cilodong & Tapos	MINI ROSALI
Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Dapil Cinere, Limo & Beji	YUSUF SUPRIADI, S.Kom.I

Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Dapil Sukmajaya	IR. JUNAEDI
Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Dapil Pancoran Mas	UBAY MAULANA
BENDAHARA	H. RIDWAN FAUZI, SH, MH
Wakil Bendahara	NOORTIAWATI DJAMI, S.Pd.I
Wakil Bendahara	MAYSAROH

Sumber: Surat Keputusan DPW PPP Jawa Barat

Tabel 4.2
Susunan Personalia Pengurus Pimpinan Majelis Syariah
Cabang Partai Persatuan Pembangunan
Kota Depok Masa Bakti 2016 - 2021

KETUA	DR. KH. AHMAD DAMANHURI, MA
Wakil Ketua	UST. HM. IQBAL
Wakil Ketua	UST. ABDUL GOFUR, S.Pd.I
Wakil Ketua	UST. MUHAMMAD SARKOWI, S.Pd
SEKRETARIS	UST. SARBINI, S.Ag
Wakil Sekretaris	ROYANI
Wakil Sekretaris	MARJAYA, SE
Wakil Sekretaris	Drs. ACENG MAKSUM

Sumber: Surat Keputusan DPW PPP Jawa Barat

Tabel 4.3
Susunan Personalia Pengurus Pimpinan Majelis Pertimbangan
Cabang Partai Persatuan Pembangunan
Kota Depok Masa Bakti 2016- 2021

KETUA	KH. ABDULLAH YAKUB
Wakil Ketua	H. AHMAD BAIDOWI, S.Ag, M.Ag
Wakil Ketua	Drs. NURSYA'BAN
Wakil Ketua	H. AHMAD SYAKIR, S.Ag
SEKRETARIS	H. DAMANHURI
Wakil Sekretaris	H. HASANUDDIN ABU SAMAH
Wakil Sekretaris	HAMZAH SIMIN
Wakil Sekretaris	ISDIYANTI SOFYAN

Sumber: Surat Keputusan DPW PPP Jawa Barat

Tabel 4.4
Susunan Personalia Pengurus Harian Pimpinan Majelis Pakar
Cabang Partai Persatuan Pembangunan
Kota Depok Masa Bakti 2016 – 2021

KETUA	DR. H. SYAMSUL YAKIN, M.Ag
Wakil Ketua	AZHARI HS
Wakil Ketua	USTH. YULYANAH
Wakil Ketua	Hj. SAYIDAH RIFQOH, S.Ag, MM.
SEKRETARIS	KH. ABDUL GHONI, SH
Wakil Sekretaris	H. ADE MUNADI, LC
Wakil Sekretaris	SULAEMAN AFIF, S.Ag
Wakil Sekretaris	WAWAN SETIAWAN

Sumber: Surat Keputusan DPW PPP Jawa Barat

4.3 Karakteristik Konflik PPP

4.3.1 Konflik Unsur (Faksionalisasi)

Secara organisasi PPP merupakan partai politik yang memiliki sistem dan basis ideologi. PPP memiliki kekuasaan yang cenderung menyebar secara organisasi ke dalam empat partai Islam yang sistem organisasinya pun tidak lepas dari ideologi.

Sebagai sistem ideologi, sesungguhnya PPP hanya bersifat sebagai penunjang integrasi dalam organisasi.²³ Karena PPP berdiri di atas deklarasi fusi empat partai Islam yang saling terintegrasi dan bersifat konfederatif, maka sejatinya konflik yang terjadi dalam PPP, tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan terakomodasinya kepentingan empat partai politik unsur fusi dimaksud.

Realita menunjukkan pemerintah Orde Baru tidak hanya ikut campur dalam hal menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam partai politik dengan instrumen yang dimilikinya bahkan seringkali pemerintah tidak ragu untuk mengintervensi partai politik lebih jauh, yaitu dengan memberi jalan terhadap orang-orang yang direstunya untuk memimpin suatu partai politik dalam hal PPP, peran besar pemerintah terlihat jelas setelah Mintaredja mampu mengakomodir kepentingan pemerintah. Ia kemudian direstui untuk menjadi Ketua Umum PPP pasca fusi.

²³ Henry Mintzberg, *Power in and Around Organization*, Englewood Cliffs, (New York: Prentice-Hall), 1983. dikutip oleh Albert Wijaya, *Kekuasaan dan Geraknya di Dalam Organisasi*, *Jurnal Ilmu Politik* 4 hal. 25

Bahkan Mintaredja pun sempat menjadi Menteri dan pernah menjadi Duta Besar Pola rekrutmen struktural di level elite PPP di semua tingkatan secara tradisi harus mewakili unsur setiap kali pergantian kepemimpinan hal itu menjadi lahan konflik yang tak terhindarkan meskipun sistem keterwakilan menjadi konsensus tidak tertulis.

Konsensus yang tidak mengikat ini, dimanfaatkan oleh pemerintah sejak digantikannya Mintaredja sebagai Ketua Umum oleh Jaelani Naro. Naro dalam membangun pola rekrutmen unsur menimbulkan gejolak di antara unsur-unsur PPP. Bahkan Jaelani Naro melakukan penyingkiran bagi komponen unsur NU yang memiliki pandangan keras terhadap pemerintah. Chalid Mawardi, menilai apa yang dilakukan oleh Jaelani Naro tidak memiliki kejelasan. dan dianggap telah meninggalkan tiga hal yang esensial dalam PPP. Yaitu, kolektivesme dalam partai, sistem rapat dan musyawarah, dan *rule of the game* yang diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.²⁴

Inilah kemudian yang memicu terjadinya konflik unsur yang sangat kuat di struktural PPP. Konflik yang diciptakan memang tidak terlepas dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Langkah - langkah pembersihan yang dilakukan Naro sangat didukung Pemerintah.²⁵

²⁴ Umaid Radi, *Strategi PPP 1973 – 1982* hal. 152

²⁵ *Ibid*, hal. 153

Fatsun politik yang menempatkan setiap unsur dalam kepengurusan sebagaimana menjadi konsensus ketika PPP dideklarasikan tidak lagi diperhatikan. Bahkan Naro tidak segan melakukan perubahan SK di tingkat wilayah demi mengamankan langkah politiknya menghadapi Mukatamar I PPP.²⁶

Sudardji dalam satu kesempatan melontarkan kritiknya kepada Naro bahwa “partai sudah terlanjur berantakan sebagai akibat banyaknya komandan”²⁷ Namun, apa yang dilakukan Jaelani Naro sebagai langkah politiknya untuk kembali menjadi Ketua Umum pada Muktamar I PPP sangat jelas mendapatkan restu dan dukungan dari pemerintah bahkan dalam pidatonya di hadapan Presiden Soeharto pada pembukaan Muktamar I di Jakarta Naro menyampaikan dukungannya kepada pemerintah untuk menerapkan asas tunggal Pancasila dalam organisasi partai politik tidak hanya sampai di situ, bahkan dalam pidatonya itu Jaelani Naro secara jelas menyatakan: “guna memantapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, Partai Persatuan Pembangunan menetapkan bahwa anggota partai bersifat perorangan guna menuju pada fusi tuntas, fisik dan politik, dan menetapkan bahwa Partai Persatuan tidak lagi berorientasi kepada ideologi, tetapi berorientasi kepada program”.²⁸

²⁶ *Ibid*

²⁷ Bila organisasi mempunyai banyak pelaku yang menonjol, maka biasanya akan muncul banyak tujuan yang berbeda, kondisi ini akan mengundang pertarungan kekuasaan. Tiap pelaku berusaha membuat koalisi atau group melalui suatu *bargaining* untuk memperhatikan kepentingan masing-masing. PPP dalam situasi yang secara organisasi mengalami perpecahan yang menyebabkan banyak elite hasil Fusi 1973 kembali pada organisasi asal. Sehingga menimbulkan banyaknya pemimpin yang terpolarisasi atas kepentingan unsur yang tergabung. Lihat *Ibid*, hal.153

²⁸ Lihat Dokumen Tertulis Dr. H. J. Naro Pidato Pembukaan “Muktamar I PPP” yang disampaikan dalam forum Muktamar I di Jakarta, 20 Agustus 1984.

Inilah awal dari konflik unsur yang terjadi di PPP. Konflik ini sangat bersifat patron klein dengan kepentingan organisasi fusi yang bergabung dalam PPP. Bahkan konflik unsur dalam PPP terus berlangsung hingga saat ini ciri yang sangat mencolok dari konflik patron klien adalah adanya perimbangan atau kombinasi kekuasaan antara unsur MI dan NU dalam menempati pucuk pimpinan partai. Jika MI mendapatkan Ketua Umum, maka NU akan menempati posisi Sekretaris Jenderal.

Tidak diperkenankan salah satu unsur menduduki keduanya kecuali Jaelani Naro yang menempatkan Mardinsyah sebagai Sekeretaris Jenderal hasil Muktamar I PPP.²⁹ Dan yang terbaru adalah penempatan Romahurmuziy selaku Sekretaris Jenderal dengan Suryadharna Ali sebagai Ketua Umum yang keduanya berasal dari unsur NU.³⁰ Tidak terpenuhinya perimbangan atau kombinasi kekuasaan dimaksud, di kemudian hari ternyata menimbulkan masalah

4.3.2 Konflik Pencalegan

Meskipun PPP adalah partai yang mengemban misi keislaman dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, namun naluri untuk duduk dalam kekuasaan sebagai anggota Legislatif menjadi bagian yang dapat menimbulkan konflik di antara struktural partai.

²⁹ Lihat Dokumen Kunjungan Silaturahmi DPP PPP ke Pemerintah dan Hasil Laporan Muktamar I PPP yang disampaikan oleh Daruussamin selaku Ketua OC penyelenggara Muktamar I PPP. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Jalan Diponegoro Jakarta Pusat.

³⁰ Lihat Hasil-Hasil Ketetapan Muktamar ke VII PPP Tahun 2010 di Kota Bandung Jawa Barat. (Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Jalan Diponegoro Jakarta Pusat).

Perebutan untuk menempatkan diri atau kolega sesama unsur dalam Daftar Calon Anggota Legislatif pada posisi nomor urut yang potensial terpilih pada masa itu memerlukan kekuatan besar dalam jabatan tertinggi partai. Sistem pemilihan yang diberlakukan dengan menggunakan sistem proporsional tertutup murni menyebabkan tingkat persaingan semakin ketat.³¹

Selain sistem pemilihan yang diatur dalam undang-undang, latarbelakang pembentukan PPP atas dasar fusi keempat partai politik Islam ternyata membawa konsekwensi lain yang menjadi faktor kerumitan tersendiri bagi PPP proses pencalonan dan penetapan DCS harus mencerminkan keempat partai di dalam penyusunannya. Keempat partai tersebut memiliki hak yang sama dalam menempatkan kadernya di setiap daerah pemilihan belum kemudian secara internal organisasi partai politik yang berfusi mengalami konflik secara internal.

Konsekuensinya, atas dasar perbedaan struktur dan keanggotaan, kultur dan basis massa organisasi semakin menambah kerumitan dalam penetapan DCS.

³¹ Lihat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemilihan umum tahun 1971, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemilihan umum tahun 1977, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemilihan umum tahun 1982, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemilihan umum tahun 1987, 1992 dan 1997. Semua sistem pemilihan yang digunakan sangat menguntungkan pimpinan partai dalam menentukan daftar caleg yang akan dijadikan sebagai anggota terpilih.

Kerumitan inilah kemudian yang dapat dijadikan alat untuk melahirkan konflik dalam PPP. Karena secara teori konflik patron klien, kondisi yang dijelaskan sebelumnya ada kemungkinan seorang anggota klien (partai) meninggalkan kelompoknya, berpindah dari satu kelompok klien ke kelompok lainnya. Jika dianalisis, perubahan patron klien ini dapat terjadi karena sebab-sebab yang bersifat pragmatis.³² Konsekuensinya konflik dan perpecahan di antara patron klien sangat mudah terjadi. Bahkan akan menambah kerumitan ketika pihak pemerintah tidak merestui salah satu figur dalam DCS dari suatu daerah pemilihan tertentu.

Pemerintah sangat berkepentingan terhadap calon yang diusulkan oleh PPP. Bahkan untuk itu tak segan-segan melakukan intervensi dalam menentukan DCS, karena orang yang dianggap dapat menimbulkan atau membahayakan stabilitas disaring lewat proses *discreening* agar tidak lolos dalam tahapan selanjutnya.³³ Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Orde Baru sangat efektif dilakukan dan ini terlihat dari tercapainya tujuan pemerintahan Orde Baru.

³² Maswadi Rauf, *Konsensus dan Konflik Politik* hal. 109

³³ Dalam pemilihan umum selama pemerintahan Orde Baru penentuan para calon yang diajukan untuk duduk di lembaga-lembaga legislatif, baik di DPR maupun DPRD, sepenuhnya berada ditangan elite partai di tingkatnya masing-masing. Akibatnya, aspirasi dan kepentingan tentang siapa yang layak menjadi calon cenderung di *faitaccompli* oleh pimpinan partai. Tak mengherankan selama pemerintahan Orde Baru, penyelenggara pemilihan umum, baik tingkat pusat maupun lokal, secara keseluruhan adalah para aparaturnya pemerintah itu sendiri. Sementara Caleg yang diajukan oleh tiga partai politik, telah melalui mekanisme *screening* sebelumnya oleh aparaturnya negara. Lihat, Syamsudin Haris, *General Election under The New Order*, dalam Hans dan Sven Cederroth, (ed), *Election in Indonesia: The New Order and Beyond*, (London and New York: Routledge Curzon, 2004), hal. 18-37. Dikutip oleh, Syamsudin Haris (ed), *Pemilu Langsung Di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)-PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 2.

Namun meninggalkan konflik dalam internal PPP yang sangat bersifat patron klien. Kondisi seperti ini terus dipertahankan selama pemerintahan Orde Baru, setiap kali pemilihan umum dilaksanakan, selalu menimbulkan konflik di dalam internal PPP.³⁴

Situasi demikian dalam pandangan Syamsuddin Harris sebetulnya bukan hanya pemerintah yang selalu aktif terlibat dalam konflik suatu partai, akan tetapi partai itu sendiri yang mengundang pemerintah untuk ikut hadir di dalam konflik internal, seperti yang terjadi di PPP.³⁵

Menjelang pemilu 1982, PPP membentuk LPUI (Lembaga Pemilihan Umat Islam), diketuai Nuddin Lubis. Tugas lembaga ini adalah sebagai alat teknis DPP untuk mempersiapkan hal ihwal penyelenggaraan Pemilu. LPUI yang beranggotakan 19 orang ini terutama ditugaskan merumuskan rancangan pedoman pencalonan. Namun setelah dua bulan berembuk tidak menghasilkan apa yang diharapkan, LPUI akhirnya mengakui kegagalan mereka. Ternyata masing-masing unsur tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya, LPUI kemudian menyerahkan keputusannya kepada Presidensi Partai.³⁶

³⁴ Konflik yang sempat terjadi yaitu konflik saat penyusunan DCS dalam pengajuan untuk pemilihan umum 1987. Sebagian kalangan menganggap DCS yang diajukan oleh J. Naro adalah daftar yang sama sekali belum dirapatkan secara formal melalui mekanisme partai. Akibatnya, tidak mengherankan bila elite struktural yang lain menyusun daftar dengan versi dan susunan yang berbeda. Lihat, Syamsudin Haris dan Ridwan Saidi (*editor*), *PPP dan Politik Orde Baru* hal. 133.

³⁵ *Ibid*

³⁶ "NU Tak Cuma Titik Temu" dalam *Tempo* 8 Maret 1980

Puncak kekesalan unsur NU atas sikap kepemimpinan Naro terjadi menjelang Pemilu 1982. Ketika itu Naro secara sepihak mengajukan Daftar Calon Sementara (DCS) dari PPP kepada Menteri Dalam Negeri Amir Machmud, yang sekaligus menjabat sebagai ketua LPU. Amir Machmud merasa gembira karena dia mendapatkan kabar bahwa daftar itu dilakukan setelah melalui pertemuan informal dengan unsur-unsur dalam PPP.³⁷ Menteri dalam Negeri beranggapan bahwa pengajuan daftar calon PPP sudah sesuai mekanisme partai tersebut tapi ternyata kemudian menimbulkan reaksi keras dari unsur NU. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memainkan peran dalam setiap gejolak internal PPP.

Kepemimpinan Naro yang demikian dinilai oleh beberapa kalangan sebagai cenderung akomodatif terhadap pemerintahan Orde Baru akan tetapi pertikaian dalam tubuh PPP yang sudah semakin memuncak itu bukan hanya berakibat tertutupnya pintu musyawarah, tapi juga semakin memmeriahkan polemik terbuka di antara tokoh-tokohnya perdebatan mengenai sah tidaknya daftar calon, mengenai mekanisme DPP PPP, bahkan mengenai kedudukan NU sebagai salah satu unsur utama PPP juga muncul dalam pemberitaan mass media.³⁸

³⁷ *Ibid*

³⁸ Slamet Effendi Yusuf, Dkk, *Dinamika Kaum Santri : Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU* (Jakarta: CV. Rajawali,1983), hal. 72

Bahkan lebih jauh lagi pertikaian itu juga mengimbas ke dalam internal NU, terutama antara tokoh-tokoh NU yang menolak daftar calon yang diajukan Jailani Naro dengan mereka yang setuju. Kelompok yang terakhir ini adalah mereka yang umumnya merasa bersyukur karena namanya selamat dari penggusuran dan hampir dapat dipastikan sebagai calon jadi.³⁹ Yang dimaksud calon jadi kala itu adalah calon dengan nomor urut kecil di Daerah Pemilihan tertentu yang hampir dipastikan akan menjadi anggota atau terpilih menjadi Anggota DPR.

4.3.3 Konflik Struktural

Sebelum membahas struktur dan personalia susunan pengurus PPP pertama, rapat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 1973 bertempat dikediaman KH. Masykur yang dihadiri oleh pimpinan - pimpinan partai politik yang berfusi dengan PPP. Rapat yang dipimpin oleh H.M.S.

Mintaredja telah membuat keputusan penting bagi kelangsungan hidup partai. Dalam keputusan penting tersebut pertama ditetapkannya Program Perjuangan dan Program Pokok Partai Persatuan Pembangunan dengan cara musyawarah dan mufakat. Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan yang memuat lima sasaran yang ingin dicapai.⁴⁰

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Lihat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP 1973, hal. 43

1. Membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan mengusahakan terwujudnya akhlakul karimah (ketinggian akhlak) dengan mempertinggi rasa kesadaran dan tanggung jawab beragama dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.
2. Mempertahankan dan membangun negara RI atas landasan Pancasila dan UUD 1945, menuju masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah SWT.
3. Memelihara persatuan umat Islam untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan.
4. Mengusahakan agar pembangunan ekonomi Indonesia dilaksanakan berdasarkan azas kekeluargaan dan gotong royong (ta'awun) sesuai dengan jiwa Pasal 33 UUD 1945 dan terjaminnya keseimbangan antara kemajuan ekonomi agraris dan industri.
5. Mengusahakan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Sedangkan dalam garis besarnya program pokok Partai Persatuan Pembangunan mencakup tiga bidang;⁴¹

1. Bidang politik, melalui politik dalam negeri dan politik luar negeri.
2. Bidang ekonomi, meliputi peningkatan pembangunan sektor pertanian, peningkatan pendapatan nasional, memanfaatkan potensi

⁴¹ *Ibid*, hal. 42

dan modal nasional dalam pembangunan dan mendorong pertumbuhan koperasi;

3. Bidang kesejahteraan rakyat, meliputi agama, pendidikan dan kebudayaan dan sosial.

Sebagai kelanjutan dari kelompok persatuan pembangunan di parlemen, langkah untuk merealisasikan pembentukan Partai Persatuan Pembangunan. Team yang terdiri dari perwakilan setiap partai politik (setelahnya disebut unsur hingga sekarang) maka yang menjadi tugas utama yaitu membentuk struktur partai, menyusun pimpinan partai dan merumuskan program partai. Untuk struktur partai yaitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang, sampai Tingkat Anak Cabang dan Ranting dalam penempatan pimpinan di tiap tingkatan, persoalan unsur menjadi persoalan antara unsur – unsur yang bergabung dalam menempatkan kadernya di posisi ketua ditiap tingkatan. Penyusunan struktur pimpinan menjadi hal yang urgen dan pelik terhadap unsur – unsur yang berintegrasi bahkan dalam catatan harian Mardinsyah, dalam penyusunan pimpinan pusat terjadi kompromi – kompromi untuk mengakomodir seluruh unsur yang berfusi. Ini disebabkan latar belakang partai yang berfusi memiliki perbedaan baik dalam mekanisme, orientasi dan tokoh – tokoh yang berbeda disetiap partai dan telah melembaga. Masing – masing unsur menginginkan tokoh – tokohnya mendapat peranan dalam PPP.⁴²

⁴² *Ibid*

Proses yang memakan waktu dan pikiran disepakati susunan pimpinan pusat yang terdiri dari Presiden Partai, Pimpinan Pusat, Majelis Pertimbangan Pusat, dan Majelis Syuro. Presiden Partai diserahkan kepada KH. Idham Khalid dari unsur NU serta Wakil Presiden dari empat unsur⁴³ dan Pimpinan Pusat, Mintareja sebagai Ketua Umum representasi dari unsur Parmusi dengan Sekretaris Jenderal Jahya Ubeid, SH sebagai unsur NU.⁴⁴ Persaingan antar unsur di PPP sejak awal menjadi bagian yang tak terhindari hingga sekarang terutama unsur NU dan Parmusi. Untuk menjadikan PPP sebagai partai modern kondisi di atas memang menjadi suatu dinamika tersendiri, karena setelah tujuan organisasi ditetapkan dan disepakati, langkah menentukan struktur organisasi dan setelah struktur terbentuk kemudian ditunjuk dan dipilih personalianya.

Setelah rampungnya penyusunan hierarki struktural PPP, maka dalam rapat tersebut kedua hal tersebut ditempuh secara bersama bahkan bertumpang tindih. Namun akhirnya terbentuklah struktur dan personalia DPP PPP pertama.

Namun dalam hal menentukan personalia terdapat cuplikan sebagian dialog antara peserta rapat seperti di ceritakan oleh Husni Thamrin dan Darussamin.⁴⁵

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Lihat Umaidi Radi MA (ed) Miriam Budiardjo, *Strategi PPP 1973-1982 Suatu Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional*, hal. 93

Ketika rapat sampai pada penentuan personalia dari struktur DPP terjadilah dialog sebagai berikut:

Mintaredja: sekarang bagaimana enaknya partai kita ini, akan

K.H. Masykur : Sudahlah siapa lagi Pak Mintaredja saja yang jadi ketua, jadi sopirnya.

Mintaredja : Jangan-jangan, jangan saya, kalau saya yang jadi, Pak Kiyai Masykur jadi apa? Pak Masykur saja.

Anwar Tjokroaminoto : Apalagi saya, jangan saya kalau saya yang jadi, nanti Pak Idham jadi apa? Pak Idham saja

Pak Idham Chalid : Jangan, jangan, jangan saya, kalau saya yang jadi nanti, Pak Rusli jadi apa?

Rusli Chalil : Kalau saya terima nanti Kiyai Bisri, Kiyai Syarifuddin jadi apa, pokoknya jangan saya, yang lain saja.

Dari dialog tersebut, terlihat suasana persaudaraan mewarnai musyawarah dalam rapat-rapat tersebut meskipun proses lobby dan diplomasi membutuhkan waktu panjang dan sempat mengalami kebuntuan, akhirnya struktur organisasi dan personalia Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Majelis Syuro Partai Persatuan Pembangunan dengan baik dapat terselesaikan dan disetujui oleh semua pihak yang berfusi.

Komposisi struktur maupun komposisi personalia yang tersusun mencerminkan adanya keinginan memadukan antara struktur yang dimiliki NU, Parmusi, PSII dan Perti. Demikian juga personalia yang menempati posisi-posisi penting dalam struktur tersebut diatur sedemikian rupa sehingga dapat mencerminkan urutan besarnya “saham” masing-masing partai.⁴⁶

NU sebagai partai yang terbesar memperoleh kedudukan penting seperti Ketua Rois ‘Aam, Presiden Partai, Ketua MPP dan Sekretaris Jenderal dan sejumlah jabatan lainnya Parmusi sebagai partai kedua terbesar, mendapat posisi penting seperti Ketua Umum, merangkap Wakil Presiden dan sejumlah jabatan lainnya. PSII memperoleh jabatan-jabatan sebagai Wakil Ketua Umum MPP, Perti memperoleh jabatan-jabatan Wakil Presiden, Wakil Ketua MPP, Ketua, dan beberapa jabatan lainnya.

Dengan demikian struktur dan komposisi personalia DPP menganut sistem seperti halnya negara-negara yang menganut sistem konfederasi.

⁴⁶ Hal ini diukur dari urutan berdasarkan perolehan kursi Pemilu 1971 sekaligus menampung fungsionaris keempat partai yang berfusi. Lihat, *ibid*